

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi pemerintahan. Otonomi Daerah mengacu pada penerapan prinsip desentralisasi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan segala urusan negara dan memberdayakan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.²

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 mengatur bahwa kewenangan sumber keuangan direalisasikan dalam pendapatan asli daerah, yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan investasi daerah dan PAD lainnya yang sah. Selain itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Nomor 10 menyatakan bahwa sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah yaitu berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh masing-masing daerah dari pemerintah pusat.³

Dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti pendapatan daerah, biaya daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia, dan kondisi makroekonomi daerah.

² Iqlima Azhar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 11 No. 02 2021, hal. 165

³ Yunus Harjito, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FEB UN PGRI Kediri*, Vol. 5 No.1, 2020, hal. 19-20

Pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Karena hal tersebut merupakan bentuk dari keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan demi mencapai kesejahteraan sosial.⁴

Kinerja keuangan pemerintah merupakan kemampuan daerah untuk mengupayakan dan mengelola sumber keuangan asli sesuai dengan kebutuhan dan untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan. Kinerja keuangan termasuk upaya pemerintah daerah untuk mengevaluasi keefektifan dalam menciptakan dan mencari sumber pendapatan peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Kondisi serta kinerja suatu pemerintahan dapat dilihat pada laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai pilihan yang mencerminkan sejauh mana ringkasan laporan keuangan memberikan informasi yang benar dan dapat diterima mengenai penyajian keuangan yang menjadi dasar kinerja keuangan pemerintah.⁵

Pemerintah daerah dianggap berhasil jika telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin besar kemampuan daerah dalam menggali potensi daerah dapat digunakan untuk membiayai

⁴ Iqlima Azhar, "Pengaruh Pendapatan...hal. 165

⁵ Nadia Febrianty & Gerry Hamdani Putra, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat Tahun 2018-2021", *Jurnal Kendali Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, 2023, hal. 31

jalannya sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, selain itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.⁶

Kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah setiap tahunnya. Meningkatnya kinerja keuangan pemerintah akan membawa hasil yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, semakin banyak sumber daya yang digunakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, maka semakin baik daerah tersebut dalam mewujudkan potensi daerahnya⁷.

Menurut Sularso & Restianto, kinerja keuangan dalam pemerintah ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.⁸ Pada penelitian kali ini untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan. Menurut Halim, rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode selanjutnya.⁹

⁶ Nina Andriany Nasution & Fitri Yani Panggabean, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara", t.p., Vol. 8 No. 1, 2017, hal. 4

⁷ Nadia Febrianty & Gerry Hamdani Putra, "Pengaruh.... hal. 32

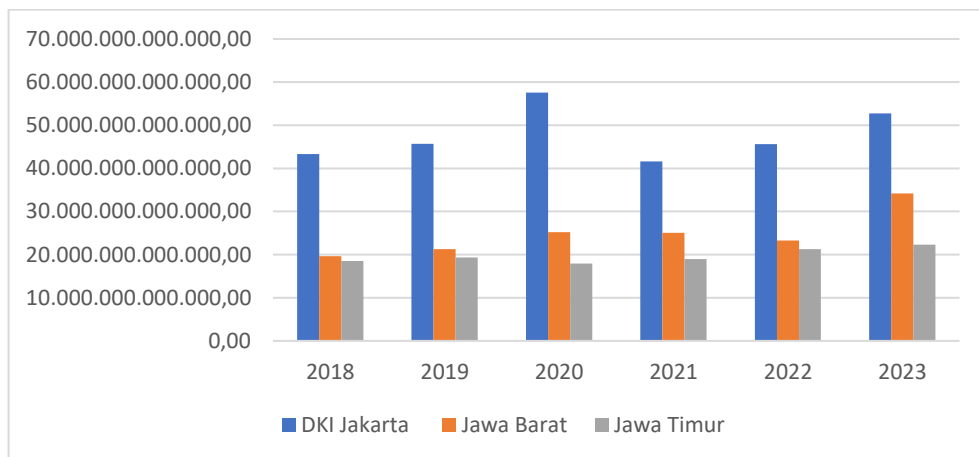
⁸ Devi Apriliyanti, "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar", (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 2

⁹ Ibid, hal. 34

Secara umum keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari PAD, namun tetap saja faktanya banyak pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada subsidi pusat yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan memiliki peranan penting yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan yang terakhir dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.¹⁰

PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan PAD tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta.¹¹ Berikut grafik pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Barat.

Grafik 1.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2023



Sumber: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Dalam Angka 2018-2023

¹⁰ Chrisna Dwi Heryanti, et. al., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 3 No. 1, 2019, hal. 98-116

¹¹ Novita Sari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020” (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2020), hal: 2

Pada grafik 1.1 menunjukkan bahwa PAD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 43.327140.000,00, sedangkan pada tahun 2019 Rp. 45.701.570.000.000,00, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu Rp. 57.561.160.000.000,00, pada tahun 2021 sebesar Rp. 41.606.310.000.000,00, pada tahun 2022 yaitu Rp. 45.661.710.000.000,00, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu Rp. 52.773.520.000.000,00.

Lalu untuk PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 19.642.915.448.000,76, sedangkan pada tahun 2019 Rp. 21.244.266.598.000,02, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu Rp. 25.223.220.670.000,29, pada tahun 2021 sebesar Rp. 25.066.632.129.000,00, pada tahun 2022 yaitu Rp. 23.249.622.260.000,00, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu Rp. 34.145.929.530.000,00.

Sedangkan untuk PAD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 18.531.062.021.000,82, sedangkan pada tahun 2019 Rp. 10.327.125.485.405,41, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan adanya wabah Covid-19 yaitu Rp. 17.950.996.508.953,80, mulai tahun 2021 mengalami peningkatan berturut-turut yaitu Rp. 18.935.883.965.000,35, pada tahun 2022 yaitu Rp. 21.256.547.752.000,60, dan pada tahun 2023 yaitu Rp. 22.317.246.728.000,01.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima daerah dengan cara dipungut menurut peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan Peraturan Daerah.¹² Pendapatan asli daerah menjadi salah satu pendapatan yang

¹² Nadia Febrianty & Gerry Hamdani Putra, "Pengaruh..... hal. 30-64

pertumbuhannya harus selalu didorong karena dinilai penting bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, sehingga semakin tinggi penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah mencerminkan otonomi daerah, karena pemerintah daerah lebih leluasa menggunakan PAD dibandingkan pendanaan dari luar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya untuk kenaikan pendapatan dari daerah setempat agar dapat memperbesar keuangan daerah. Menguatnya pertumbuhan pendapatan daerah dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik.

Dana perimbangan adalah dana yang dihimpun dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi. Tujuan alokasi dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi perekonomian daerah.¹³

¹³ Chrisna Dwi Heryanti, et. al, "Pengaruh Pendapatan..... hal. 102

Penerimaan dana perimbangan menunjukkan kemampuan keuangan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk mencari sumber potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah dan kemandirian keuangannya juga akan rendah sehingga menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga rendah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak seperti pajak bumi dan bangunan selain itu juga berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Penghasilan (PPh).¹⁴

Pemerintah daerah juga telah melakukan upaya tertentu melalui kegiatan belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur yang juga berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pada asset tetap dan asset lainnya untuk meningkatkan dan memajukan kemudahan dan kenyamanan bagi warga negara untuk jangka panjang.¹⁵

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa fasilitas umum seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung dan bangunan, penyediaan angkutan umum dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat

¹⁴ UU Nomor 33 Tahun 2004

¹⁵ Hasna Lathifa & Haryanto, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 2

meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Produktivitas tersebut yang pada akhirnya menentukan arah dimana berbagai pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja modal dapat mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah dimasa depan. Pertumbuhan pendapatan daerah yang terus meningkat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Belanja modal umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Pembangunan daerah erat kaitannya dengan kualitas pelayanan publik disuatu daerah. Belanja daerah dapat dibedakan menjadi belanja modal dan belanja berulang pada layanan komunitas, biaya administrasi dan jasa keuangan.¹⁶

Belanja modal memiliki ciri-ciri yang spesifik yang menunjukkan adanya pertimbangan dalam pengalokasiannya. Perolehan asset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Fenomena pada pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini, realisasi pendapatan daerah Jawa Timur pada tahun 2018-2023 selalu melebihi target meskipun pada saat pandemi *Covid-19*. Pada Tahun 2020, penerimaan PAD menurun sebanyak 7% dari Rp. 19.327.125.485,41 menjadi 17.950.996.508,80. Selain itu, belanja modal yang tidak sebanding dengan belanja lain mengakibatkan pengeluaran belanja modal menjadi tidak sehat. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi pendapatan daerah mencapai 102,34% setara dengan Rp.

¹⁶ Devi Apriliyanti, "Pengaruh Belanja..... hal. 4

33,59 T dan mencapai target yang telah ditentukan yaitu Rp. 32,82 T. Selain itu untuk realisasi belanja daerah mencapai 92,83% setara dengan Rp. 34,47 T dari target Rp. 37,14 T.¹⁷ Pemerintah seharusnya mengoptimalkan kegiatan belanja daerah karena akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Sedangkan pada pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat pada tahun 2018-2023 juga selalu melebihi target meskipun pada saat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2023 realisasi PAD mengalami peningkatan kurang lebih 4,63% atau setara dengan Rp. 34,15 T. Presentase rata-rata penggunaan PAD untuk belanja daerah pemerintah daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Barat sebesar 10-19,99%. Faktanya masih terdapat pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Barat yang presentase penggunaan PAD untuk belanja daerah berada dibawah 10%. Artinya belanja daerah pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Barat sebagian besar dibiayai dari dana perimbangan.

Berikut data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat Tahun 2018-2022.

¹⁷ Dwi Ratnasari, Dianita Meirini, "PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur", *Jurnal Akuntansi*, vol. 32, No. 5, 2022, hal. 1190

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Provinsi
Jawa Timur 2018-2022

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
2018	18.531.062.021,82	13.295.784.849,27	2.840.552.249,70
2019	19.327.125.485,41	13.941.687.209,10	2.770.973.973,02
2020	17.950.996.508,80	13.480.111.730,77	1.904.556.949,35
2021	18.935.883.965,35	15.186.749.240,65	1.969.920.805,39
2022	21.256.547.752,60	10.563.739.586,28	2.528.735.658,29

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal Provinsi Jawa Timur. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018-2019 dan tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan masyarakat yang bisa mempengaruhi menurunnya PAD, dana perimbangan, dan belanja Modal.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Provinsi
Jawa Barat 2018-2022

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
2018	19.642.915.448,76	14.208.000.403,58	3.145.847.260,32
2019	21.244.266.598,02	14.715.372.046,65	2.530.347.542,36
2020	25.223.220.670,29	16.336.732.772,50	4.683.900.310,75
2021	25.066.632.129,00	16.293.819.865,00	1.688.922.000,00
2022	23.249.622.260,00	10.136.013.000,00	2.479.636.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Provinsi Jawa Barat Dalam Angka

Tabel 1.2 menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal Provinsi Jawa Barat. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2018-2022 hasil PAD, dana perimbangan, dan belanja modal Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami kenaikan dan penurunan.

Penilaian kinerja pemerintah daerah merupakan hal yang harus dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah pada tahun tersebut dengan harapan pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa menunggu dukungan finansial yang diperoleh dari pusat.¹⁸

Penelitian ini diperkuat oleh *teori agency*, menurut Jensen dan Meckling, *teori agency* merupakan perjanjian antara 2 belah pihak yaitu *agen* dan *principal*, dimana *principal* memberikan wewenang dan kepercayaan kepada *agen* untuk dalam mengambil ketentuan atas nama *principal*.¹⁹

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah bertindak sebagai *agen* (pengelola pemerintahan) dan menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai pihak *principal*. Pihak *principal* pasti menginginkan hasil kinerja yang baik dari *agen* dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan

¹⁸ Ni Kadek Novia Indrawati Putri & Ni Putu Ayu Darmayanti, "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Wilayah Sarbagita Provinsi Bali", *E-Journal Manajemen*, Vol. 8 No. 5, 2019, hal. 2836

¹⁹ Helen Andaresta, et.al, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", *KORELASI (Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, Vol. 2, 2020, hal. 1671

pelayanan yang baik, sedangkan laporan keuangan dan pelayanan yang baik bergantung pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Apabila kinerja pemerintah baik maka masyarakat akan mempercayai pemerintah.

Penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dkk, yang berjudul Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan, dengan lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017. Hasil dari penelitian tersebut yaitu belanja modal, PAD, dan dana perimbangan dengan serentak berpengaruh dan relevan ke kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian tersebut berlokasi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dengan periode yang diteliti tahun 2014-2017. Temuan dari penelitian tersebut adalah pada struktur APBD kota/kabupaten di Indonesia pada tahun 2016 yaitu penilaian kinerja keuangan dapat dinilai dari laporan realialisasi APBD, dikarenakan semakin tinggi belanja modal yang dikonsumsi maka berbanding lurus dengan tingkat produktifitas perekonomian yang tinggi dalam hal kinerja PEMDA. Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai setiap kegiatan terlebih dalam hal keuangan oleh

karena perkembangan pembangunan yang pesat bersumber dari pengalokasian belanja modal yang tepat.²⁰

Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, yang berlokasi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan tahun anggaran terbaru yaitu Tahun 2018-2022 dan penelitian yang penulis lakukan yakni mendeskripsikan penjelasan mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara lebih terperinci.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana terdapat beberapa variabel independen untuk dianalisa pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka penulis meneliti dengan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

²⁰ Novita Sari, et.al, “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan”, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 223.

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, karena kinerja pemerintah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2. Pendapatan asli daerah menjadi kunci utama pemasukan daerah, hal ini dianggap sangat penting dalam kontribusi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah daerah masih bergantung pada subsidi pusat yaitu dana perimbangan
4. Pemerintah daerah harus memperhatikan belanja modal karena kebutuhan masyarakat harus tetap diperhatikan dalam membangun infrastruktur negara. Pembangunan dalam hal itu merupakan pembangunan infrastruktur yang dialokasikan dalam bentuk belanja modal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022?
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022?

4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022
3. Untuk menguji pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022
4. Untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori khususnya penelitian mengenai Keuangan Negara dan Daerah khususnya pada Kinerja Keuangan Daerah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya khususnya pemerintah daerah. Selain itu, dapat dijadikan tolak ukur dan masukan untuk meningkatkan kinerja, mengoptimalkan fungsi dan peran informasi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, pengembangan intelektual dibidang Keuangan Negara dan Daerah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dijadikan sebagai subjek penelitian. Ruang lingkup penelitian ini saling berkaitan dengan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal (X3). Sedangkan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota (Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2018-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai batasan tertentu untuk memudahkan penelitian dan agar hasilnya akurat. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan masalah. Kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, kondisi makroekonomi dan sumber daya manusia. Untuk menguraikan topik tersebut maka keterbatasan penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah.

G. Penegasan Istilah

1. Variabel Terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah)

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan atau pemerintahan telah menerapkan aturan pengawasan keuangan dengan baik dan benar.

2. Variabel Bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber utama pendapatan daerah yang ditujukan khusus untuk pelaksanaan pembangunan dari Pemerintah Daerah dan menurut ketentuan perundang-undangan. Dana perimbangan merupakan dana yang diterima dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sehubungan dengan pelaksanaan

desentralisasi.²¹ Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian awal, mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.
2. Bagian utama, terdiri dari

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang diperlukan untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Pada bab ini mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah. Kemudian berisikan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

²¹ Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, (Malang: UB Press, 2018), hal. 90

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan sampling, sumber data, variable dan skala pengukurann, Teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah.

BAB VI Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

3. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.